



Dari Zona Merah Dilarang Masuk DIY

Mudik Tahun Ini Resmi Tak Dibolehkan



Tavip Agus R.
Kepala Dishub DIY

Khusus yang dari zona merah saja. Untuk daerah lain masih kami beri toleransi. Namun tetap dengan penjagaan yang ketat.

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah akan melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas lewat konferensi video, Selasa (21/4).
"Pada rapat hari ini (kemarin), saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata dia. Jokowi meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

Menanggapi ini, Dinas Perhubungan

● ke halaman 7

Instansi	Nilai Ben.
	☐ Negatif
	☐ Positif
	☐ Netral

☐ Biasa

☐ Jumpa Pers

Dari Zona Merah Dilarang

• Sambungan Hal 1

(Dishub) DIY baru saja menyelesaikan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kebijakan bagi para pemudik. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan, Pemda DIY menolak pemudik dari zona merah untuk masuk ke DIY.

Sanksi bagi yang melanggar, Pemda DIY akan berlakukan sesuai arahan dari Kementerian Perhubungan. "Khusus yang dari zona merah saja. Untuk daerah lain masih kami beri toleransi. Namun tetap dengan penjaan yang ketat," tegas Kepala Dishub DIY, Tavip Agus Rayanto, Selasa (21/4).

Pemberlakuan kebijakan itu akan diberlakukan mulai 24 April. Ia berharap supaya masyarakat ikut berpartisipasi pencegahan dan penyebaran Covid-19 di DIY. "Baru saja kami selesai koordinasi dengan gubernur. Katanya di Jakarta sudah dilarang mudik masuk Jogja masih bablas," sambungnya.

Terkait penambahan personel yang bertugas di pertabasan, hari ini akan kembali dibahas. Pastinya akan melibatkan anggota TNI, Polri, dan juga BPBD.

"Termasuk rencana *sweeping* terminal dan stasiun," pungkas Tavip.

Perketat

Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji, mengatakan bahwa adanya kebijakan baru tersebut membuat penjaan di pos-pos yang berada di jalan protokol menjadi lebih ketat. Pemda DIY telah menyikapi surat edaran Kempenan RB terkait larangan mudik bagi PNS dan keluarganya. Hal tersebut telah diteruskan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjadi perhatian semuanya. Bila masih melanggar, di mana ASN tetap nekat mudik, maka ada sanksi disiplin yang akan ditegakkan.

"Lalu terkait dengan pemudik, tetap dilakukan sesuai protokol yang saya sampaikan bahwa semua yang masuk di DIY harus pemeriksaan di mana mereka lewat apa itu stasiun, bandara atau bahkan jalan," ujar Aji, di ruang kerjanya, Selasa (21/4).

Ia pun menyambut baik larangan presiden terhadap pemudik. Kebijakan itu dinilai Aji bisa menekan membeludaknya pemudik yang akan masuk ke daerah, termasuk DIY pada masa-masa ini hingga menjelang Lebaran nanti. Aji mengatakan, konsekuen-

si dari kebijakan tersebut adalah penjaan yang lebih ketat di jalanan.

"Memperketat iya. Di jalan-jalan itu sekarang agak kendor karena di Jakarta sudah PSBB (pembatasan sosial berskala besar), seluruh kendaraan seluruh angkutan sudah dibatasi. Sulit ke Jawa Tengah, sulit ke Jawa Timur, sehingga kalau kita lihat dari luar kota tidak begitu banyak," urainya.

Namun, kondisi sekarang bisa berbeda dengan beberapa waktu menjelang Lebaran nanti. Belum lagi ketika ada pemudik yang berusaha curi start untuk segera kembali ke kampung halamannya, penertiban harus dilakukan lebih serius. "Kalau kemudian larangan yang diselenggarakan membatasi jumlah kendaraan luar kota ke Yogya, saya kira itu jauh lebih mudah," ucapnya.

Aji menambahkan, selain pembatasan kendaraan luar kota, ia juga berharap bahwa di titik keberangkatan telah diserukan bahwa tidak boleh ada perpindahan ke luar daerah yang dihuni saat ini. "Sebetulnya paling urgen justru yang berangkat itu tidak boleh keluar. Kalau kemudian sampai di sini, sampai di Tempel, suruh balik gimana caranya kita minta balik," bebernya.

Bukan perkara mudah untuk melarang pemudik masuk DIY, apalagi ketika mereka terlanjur sampai. Upaya yang bisa dilakukan adalah melaksanakan pemeriksaan sesuai protokol. "Kita lakukan pencegahan yang lebih ketat. Mereka tidak boleh kemudian berkumpul dengan keluarga. Dia harus karantina di luar rumahnya. Desa-desa kan menyediakan tempat karantina, dikarantina di sana 14 hari," ujarnya.

Sementara itu PLT Kepala BKD DIY, Sigit Sapto Raharjo, mengatakan bahwa ia mengimbau ASN di DIY untuk mematuhi aturan yang dikeluarkan. "Tapi kalau dengan kondisi sekarang, otomatis enggak akan mudik," ucapnya.

Ketatnya penjaan di wilayah, disampaikan Sigit sudah berlaku dengan optimal di DIY. Masing-masing RT dan RW mempertahankan dirinya dengan melakukan pembatasan akses keluar masuk terpusat di satu pintu.

"Itu upaya pencegahan mereka dan mereka pasti lapor ke camat masing-masing kalau ada yang pulang kampung. Bagi pemudik, mereka tidak boleh masuk rumah dulu, tapi ke puskesmas untuk dicek kesehatan meski yang bersangkutan membawa surat sehat," ujar Sigit. (hda/kur/kpc)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005